

## **UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK YANG KELUAR MASUK DI KOTA SORONG**

**Ernawati Sarifuddin<sup>1</sup>, Muh. Ridha Suaib<sup>2</sup>, Arie Purnomo<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi pemerintah pendataan Penduduk yang keluar masuk di Kota Sorong, dan strategi yang digunakan dalam pendataan penduduk, serta mengetahui kendala dan alternatif jalan keluar dalam mengatasi masalah kependudukan di Kota Sorong. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan penekanan pada deskriptif dan analitis. Yang menjadi populasi atau sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Sorong, yang berjumlah 10 orang. Dari hasil analisis yang dilakukan maka Pemerintah Kota Sorong terus melakukan optimalisasi pengelolaan data kependudukan. Wujud optimalisasi tersebut adalah pelaksanaan SIAK baik on-line maupun off-line. SIAK on-line sampai saat ini telah mencakup beberapa distrik. Untuk menunjang upaya tersebut Pemerintah Kota Sorong membentuk instansi pelaksanaannya yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong. Namun demikian upaya optimalisasi tersebut belum semuanya mematuhi peraturan perundangan yang relevan, sehingga pengelolaan data kependudukan belum optimal. Ada beberapa faktor yang menghambat upaya tersebut yakni sumber daya aparatur, sarana, teknologi, sosialisasi dan structural. Namun juga ada beberapa faktor yang mendukungnya yakni *political will* pola bisnis dan semangat kerja aparatur.

Kata Kunci: Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Sorong

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perlu juga diinformasikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berubah status menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan yang paling besar adalah pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kompleks, dan disusul dengan pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik serta dengan berbagai tujuan yang dimilikinya.

Masalah kependudukan Kota Sorong sangatlah kompleks karena sangat berdekatan dengan Kota Sorong sebagai pintu masuk keluar Papua. Apalagi ketertiban penduduk Kota dan kabupaten belum sangat jelas. Seperti banyak penduduk Kabupaten Sorong berKTP Kota Sorong, Demikian sebaliknya. Ketertiban pendataan penduduk keluar masuk di Kota Sorong perlu mendapat perhatian oleh semua pihak khususnya dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sorong.

Pegawai diharapkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit pegawai yang tidak disiplin pada saat jam kerja, akibat dari ketidak disiplin tersebut berdampak negatif terhadap pelayanan kerja. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kedisiplinan pegawai adalah kondisi seseorang, motivasi dan kepemimpinan. (Simatupang, J. H.,2019).

Persoalan keluar masuk penduduk di Kota Sorong yang tidak beraturan inilah membuat penulis mengangkat judul penelitian sekaligus sebagai telaah ilmiah dengan judul “ Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk yang keluar masuk di Kota Sorong”. Kiranya hal ini sangatlah penting untuk di teliti karena permasalahan ketertiban cera prosedur adminitrasid dan demi ketertiban dan keamanan suatu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan penekanan pada deskriptif dan analitis. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata- kata (baik tertulis maupun lisan) dan pelaku yang dapat diamati”. (Lexy Moleong, 2000:5)

### **Waktu dan lokasi Penelitin**

Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Desember 2016 s/d Januari 2017. Sedangkan lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Catatan Sipil Kota Sorong.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam skripsi ini adalah pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Sorong, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

a. Observasi ( pengamatan )

Merupakan teknik pengumpulan data yang diamati secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Interview ( Wawancara )

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada responden yang berkaitan dengan pendataan penduduk yang keluar masuk di kabupaten Sorong

Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu guna mendapat data yang valid maka penulis memberikan waktu maupun kesempatan kepada responden untuk menceritakan baik kondisi organisasi itu sendiri maupun pelaksanaan administrasi, serta metode dan sistem yang dipakai.

Di samping menggunakan metode studi lapangan penulis juga menggunakan studi pustaka yakni dengan basis referensi buku-buku, untuk membantu penulis menganalisis dan mengkajinya sesuai dengan data empiris di lapangan.

### **Teknik Analisis Data**

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder Adapun data yang diperoleh melalui analisis deskripsi ini dilakukan dengan cara-cara penyajian dalam bentuk tabel dan gambar sesuai dengan keberadaan data yang sesungguhnya dan tidak menggunakan uji kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi dan Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, ruang lingkup tugasnya meliputi 15 jenis pelayanan :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Kartu Keluarga (KK);
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- d) Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) WNA;
- e) Surat Keterangan Pindah WNI;
- f) SKPD Tinggal Tetap WNA;
- g) SKPD Tinggal Terbatas WNA;

- h) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
- i) Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN);
- j) Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN);

2. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a) Akta Kelahiran;
- b) Akta Kematian;
- c) Akta Perkawinan;
- d) Akta Perceraian, Pengakuan/Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak;
- e) Akta Perubahan Nama.

Sampai dengan akhir April tahun 2010 tingkat capaian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, perhitungan, penetapan dan penerimaan retribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan, digambarkan dengan capaian indikator-indikator pada tiap-tiap sasaran sebagai berikut :

1.	Sasaran 1	:	Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan sampai ke tingkat distrik
	Indikator	:	tersedianya sarana SIAK; Capaian (100%)
2.	Sasaran 2	:	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat Kota Sorong terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan;
	Indikator	:	Capaian 100 %
3.	Sasaran 3	:	terwujudnya optimalisasi penerimaan retribusi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
	Indikator	:	terlaksananya pemberian insentif kepada petugas pengolah data;
4.	Sasaran 4	:	terwujudnya kualitas SDM aparat di tingkat distrik dan tingkat Kelurahan/kampung
	Indikator	:	terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi kepada aparat pelaksana di tingkat distrik dan Kelurahan / kampung; Capaian 100 %
5.	Sasaran 5	:	terwujudnya database kependudukan Kota Sorong
	Indikator	:	terlaksananya pemutakhiran data penduduk berdasarkan KK; Capaian 100%

## **Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Mengatasi Masalah Kependudukan di Kota Sorong**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan, dengan jenis pelayanan, yaitu :

### Pendaftaran Penduduk, meliputi :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA;
5. Surat Keterangan Pindah WNI;
6. Surat Keterangan Pindah (SKP) Tinggal Tetap WNA;
7. Surat Keterangan Pindah (SKP) Tinggal Terbatas WNA;
8. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
9. Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN);
10. Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN);

### Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Kematian;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Perceraian;
5. Akta Pengangkatan Anak
6. Akta Perubahan Nama.

Mewujudkan hasil capaian kinerja yang meliputi

1.	Sasaran 1	:	Peningkatan kinerja SDM dalam penyelesaian administrasi perkantoran dan administrasi keuangan dalam menunjang administrasi kependudukan
	Indikator	:	- Meningkatnya kemampuan SDM dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan administrasi keuangan - Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
2.	Sasaran 2	:	Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penerapan SIAK
	Indikator	:	Meningkatnya kecepatan dan akurasi proses pelayanan administrasi

			kependudukan dan diseminasi informasi
3.	Sasaran 3	:	Terpenuhinya hak – hak administrasi kependudukan
	Indikator	:	Terlaksananya penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan sebagai legalitas resma
4.	Sasaran 4	:	Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang prosedural dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
	Indikator	:	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat
5.	Sasaran 5	:	Tersedianya database kependudukan sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
	Indikator	:	Terealisasinya database kependudukan oleh sektor terkait
6.	Sasaran 6	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat</li> <li>- Terwujudnya peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan</li> <li>- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>- Terlaksananya pengadministrasian Administrasi Kependudukan</li> </ul>
	Indikator	:	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial
3. kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
4. mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal ini dicapai dengan cara :

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key succes factor*) dengan pendekatan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*), sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Faktor-faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (opportunity) dan Ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat digambarkan sebagai berikut:

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Adanya Undang – Undang tahun 2002 dan Undang – Undang Tingginya tingkat mobilitas penduduk</li> <li>3. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan</li> <li>2. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit / mahalnya pengurusan administrasi kependudukan</li> <li>3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data &amp; dokumen kependudukan</li> </ol>

### 2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari Kekuatan (Strenght) dan Weakness (Kelemahan) yang secara spesifik dapat digambarkan pada faktor-faktor internal sebagai berikut:

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya UU, PP dan Perpres</li> <li>2. Tersedianya Perda dan Perbup tentang administrasi kependudukan</li> <li>3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima</li> <li>4. Tersedianya SDM yang memadai. di bidang teknologi Informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan</li> <li>2. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan</li> <li>3. Belum optimalnya kinerja SDM</li> <li>4. Belum memadainya sistem teknologi informasi</li> </ol>

Upaya Penertiban penduduk.

Langkah penertiban penduduk sesungguhnya bukan semata-mata persoalan melakukan revisi aturan meningkatkan kinerja aparat yang selama ini memang masih lemah. Ada banyak aspek yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi upaya mencapai tujuan dari penertiban penduduk yang gencar dibicarakan saat ini. Tetapi dari sekian aspek terkait, kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang paling menentukan .

**Tabel.** Data penduduk Kota Sorong tetap tahun 2011 menurut kategori Distrik sebagai berikut :

KODE_KEC	NAMA_KEC	JUMLAH KEL/DESA	AGREGAT (DAK2)		JUMLAH	KPL. KELUARGA
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
92.01.01	MAKBON	9	1.603	1.523	3.126	668
92.01.02	MORAID	7	1.333	973	2.306	459
92.01.04	BERAUR	10	992	863	1.855	366
92.01.05	SALAWATI	7	6.193	5.400	11.593	3.107
92.01.06	SEGET	8	3.273	1.891	5.164	1.050
92.01.07	AIMAS	10	23.816	20.646	44.462	11.692
92.01.08	KLAMONO	13	3.292	2.763	6.055	1.422
92.01.10	SAYOSA	7	911	787	1.698	357
92.01.12	SEGUN	6	1.569	1.066	2.635	537
92.01.13	MAYAMUK	8	6.935	6.031	12.966	3.140
92.01.14	SALAWATI SELATAN	8	1.678	1.189	2.867	585
92.01.17	KLABOT	8	1.267	1.100	2.367	501
92.01.18	KLAWAK	9	1.161	998	2.159	519
92.01.20	MAUDUS	8	634	486	1.120	185
92.01.39	MARIAT	5	8.190	7.137	15.327	3.850
92.01.40	KLAYILI	6	727	593	1.320	273
92.01.41	KLASO	5	349	275	624	126
92.01.42	MOISEGEN	7	1.551	1.271	2.822	784
	<b>SORONG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>65.474</b>	<b>54.992</b>	<b>120.466</b>	<b>29.621</b>

Sumber : Profil Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

### **Kendala Yang ditemukan Optimalisasi Pengelolaan Data Kependudukan**

Factor penghambat yang ditemukan antara lain:

1. Sumber daya Aparatur. Meskipun Pemerintah Kota Sorong menerapkan SIAK sejak tahun 2011, namun sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang memiliki standar kompetensi yang relevan terutama untuk paranat computer, akibatnya membuat pengelolaan data kependudukan belum optimal;
2. Sarana pengelolaan data kependudukan, (tangibles). Minimnya sarana sangat dirasakan oleh para Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang berada di distrik. Keterbatasan jumlah dan kualitas computer dan peralatan elektronik pendukung lainnya, termasuk soft ware untuk on-line sangat mengganggu kelancaran pengolahan data terutama yang berasal dari pendaftaran penduduk;

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini terutama dirasakan oleh Distrik-distrik telah menerapkan SIAK on-line. Sambungan on-line antara distrik dengan Dinas Kependudukan sering tidak connect, akibatnya baik pelayan maupun pengelolaannya menjadi tertunda;
4. Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sorong sangat kurang, sehingga pengetahuan dan kesiapan masyarakat menghadapi era on-line masih sangat kurang;

### **Pecahan Masalah dalam Optimalisasi Pengelolaan Data Kependudukan**

Factor pendukung yang ditemukan antara lain:

1. Political will. Pemerintah Kota Sorong dengan segala keterbatasan tetapi memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pengelolaan data kependudukan
2. Perkembangan Pola bisnis; banyak sekali pola bisnis yang menurut masyarakat untuk menyertakan dokumen kependudukannya, sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan dirinya.
3. Semangat kerja aparatur; meskipun dengan segala keterbatasan peralatan maupun insentif yang diperolehnya, aparatur baik yang berada di dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki semangat kerja tinggi.

### **KESIMPULAN**

1. Pemerintah Kota Sorong terus melakukan optimalisasi pengelolaan data kependudukan. Wujud optimalisasi tersebut adalah pelaksanaan SIAK baik on-line maupun off-line. SIAK on-line sampai saat ini telah mencakup beberapa distrik.
2. Untuk menunjang upaya tersebut Pemerintah Kota Sorong membentuk instansi pelaksanaannya yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong. Namun demikian upaya optimalisasi tersebut belum semuanya mematuhi peraturan perundangan yang relevan, sehingga pengelolaan data kependudukan belum optimal.
3. Ada beberapa factor yang menghambat upaya tersebut yakni sumber daya aparatur, sarana, teknologi, sosialisasi dan structural. Namun juga ada beberapa factor yang mendukungnya yakni *political will* pola bisnis dan semangat kerja aparatur

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995, "Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia" dalam buku: **Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan**, editor Mohamad Arsyad Anwar,

Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan. Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hal Hill, 1996, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, PAU (Studi Ekonomi) UGM & PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Iskandar,N: 1974, Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia, *special Reprint series No.4, demographic Institute FEUI, January 1974,p.19. Jakarta*

Johnson,D.G. and Lee, Ronald. 1987. Population Growth and Economic Development Issues and Evidences. Madison, WI: University of Winsconsin Press, USA

Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1994, Indonesia Country Report Population and Development, Jakarta, Indonesia.

Rosenzweig, Mark R. 1998, Human Capital population Growth, and Economic Development, *Journal of Policy Modelling, special Issue on Population Growth and Economic Development.*

Simatupang, J. H., Pabalik, D., & Nurchasanah, S. (2019). Peranan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Efektifitas Pelayanan Masyarakat Di Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 44-51.

Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan Pusat dan pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007- 2012 Kota Sorong Kabupaten Sorong Dalam Angka 2010, Badan Statistik Kota Sorong Profil Pembangunan Kota Sorong